



PERLUNYA PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA KIAI PONDOK PESANTREN DI MASA PANDEMI COVID-19 *The Need for Provision of Social Assistance to Kiai Pondok Pesantren in the Covid-19 Pandemic*

Edy Effendi, Suyono, Amin Hidayat¹

Info Artikel

¹Direktorat Jenderal Anggaran,
edy_effendi@kemenkeu.go.id

Riwayat Artikel :
Diterima 16-10-2020
Direvisi 21-11-2020
Disetujui 04-12-2020
Tersedia online 10-12-2020

JEL Classification : D61, H24

Abstract

The Covid-19 pandemic has had a serious impact in almost all fields, including Islamic boarding schools and their owners, kiai. The government has helped Islamic boarding schools as institutions, but not to kiai personally. This study aims to provide answers to whether or not it is necessary to provide social assistance to kiai personally, so that it can be used as input to stakeholders. This study uses the Regulatory Impact Assessment (RIA) method, analyzing the aspects of the benefits and costs of providing social assistance to kiai and how these two things touch based on the perceptions of expert opinion. Data processing was carried out based on the results of a questionnaire conducted using the Analytical

Hierarchy Process (AHP) model which was distributed to expert respondents. The results of the study indicate that it is necessary to provide social assistance to kiai personally.

Keywords : Cost Benefit Analysis, Kiai, Regulatory Impact Assessment

Abstrak

Pandemi covid-19 memberikan dampak serius di hampir segala bidang, termasuk pondok pesantren dan kainya. Pemerintah telah memberikan bantuan kepada pesantren sebagai institusi, namun tidak kepada kainya secara pribadi. Kajian ini bertujuan untuk memberikan jawaban atas perlu tidaknya memberikan bantuan sosial kepada kiai secara pribadi, untuk dapat dijadikan sebagai masukan kepada pemangku kepentingan. Kajian ini menggunakan metode *Regulatory Impact Assessment* (RIA), menganalisis dari aspek manfaat dan biaya pemberian bantuan sosial kepada kiai dan bagaimana kedua hal tersebut bersentuhan berdasarkan persepsi/pendapat ahli. Pengolahan data dilakukan atas hasil kuesioner yang dilakukan dengan menggunakan model *Analytical Hierarchy Process* (AHP) yang disebar kepada responden ahli. Hasil kajian menunjukkan perlu diberikan bantuan sosial kepada kiai secara pribadi.

Kata kunci : Analisa Biaya dan Manfaat, Kiai, *Regulatory Impact Assessment*

1. PENDAHULUAN

Akhir tahun 2019, dunia dilanda kepanikan dengan kemunculan wabah pandemik virus covid-19 (*corona virus*) yang berawal dari Wuhan, China. Wabah ini menyebar dengan cepat ke berbagai negara, tak terkecuali Indonesia yang dimulai pada bulan Maret 2020. Warga yang terpapar semakin banyak. Data bulan September 2020 menunjukkan warga di Indonesia yang terserang virus mencapai 240 ribu orang lebih. *World Health Organization* (WHO) bahkan sudah menetapkan wabah virus korona sebagai pandemi global.

Wabah dengan cepat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Berbagai sektor terkena imbasnya. Pelambatan ekonomi mulai terasa di dalam negeri. Diperkirakan pertumbuhan laju ekonomi dalam negeri menurun, sehingga mengakibatkan pemutusan hubungan kerja dan pengangguran, dan berujung pada kenaikan kemiskinan. Ekonomi Indonesia triwulan II tahun 2020 terhadap triwulan II tahun 2019 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 5,32 persen. Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam APBN tahun 2020 sebelum *covid-19* dipatok 5,3 persen, setelah *covid-19* diperkirakan hanya mencapai 1 persen, bahkan *Asian Development Bank* (ADB) memperkirakan tumbuh -1 persen. Salah satu sektor yang terkena imbasnya adalah sektor pendidikan, baik pendidikan umum maupun keagamaan. Hal ini terlihat dari banyaknya sekolah yang menutup sekolah dan meliburkan siswanya demi terhindar dari penyebaran virus corona, serta melaksanakan pembelajaran melalui daring.

Dalam menghadapi pandemi tersebut, pemerintah telah mengambil langkah cepat dan luar biasa serta terkoordinasi dengan mengeluarkan PERPPU Nomor 1 Tahun 2020, yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Pemerintah telah menyediakan dana stimulus sebesar Rp695,2 triliun yang dikenal dengan nama Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dana tersebut terbagi dalam berbagai sektor antara lain pada sektoral Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sebesar Rp106,11 triliun. Salah satu stimulus pada sektor ini adalah pemberian bantuan sosial kepada 28 ribu lebih pondok pesantren di Kementerian Agama sebesar Rp2,59 triliun.

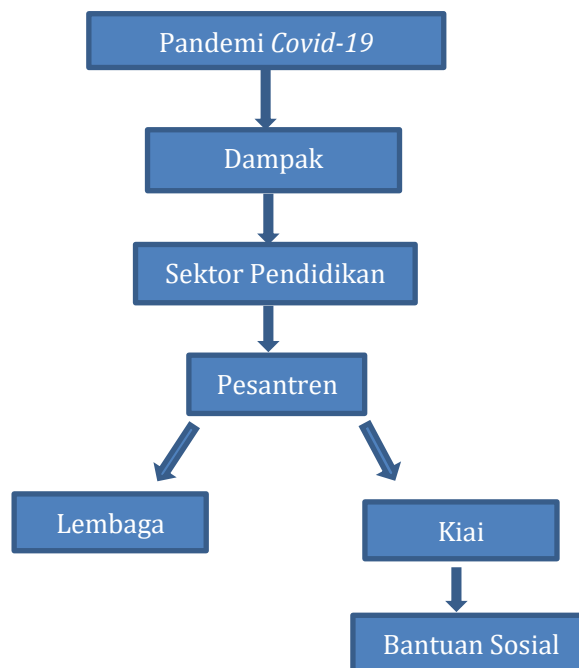
Belanja Bantuan Sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi diri dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Dalam perkembangannya, ada penambahan kegunaan yaitu untuk meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, ada yang disebut Bantuan Pemerintah yaitu bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/nonpemerintah. Berdasarkan pengertian tersebut, kiai pada pondok pesantren adalah salah satu kelompok masyarakat yang bisa diberikan dan mendapat bantuan dari pemerintah.

Kiai, Tuan Guru, *Anre Gurutta*, *Inyiah*, Syekh, Ajengan, Buya, Nyai, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh pesantren. Kiai merupakan pemimpin tertinggi pesantren yang mampu menjadi pengasuh, figur, dan teladan dalam penyelenggaraan pesantren. Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt. Juga menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil'alam* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya. Hal itu dilakukan melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pesantren bisa dikatakan sebagai laboratorium kehidupan, tempat para santri belajar hidup dan bermasyarakat dalam berbagai segi dan aspeknya bersama kiai dan ustaz (guru).

Kiai merupakan elemen yang paling esensial dari pesantren. Biasanya kiai adalah pendiri pesantren sehingga pertumbuhan pesantren tergantung pada kemampuan kiai itu sendiri. Kiai

membiyai berjalan pesantrennya antara lain dari sumbangan wali santri dan usaha-usaha produksi dan perdagangan yang dijalankan bersama istrinya. Usaha tersebut bisa berupa katering untuk konsumsi santri, dan toko menjual barang-barang kebutuhan santri. Dengan adanya wabah pandemi *covid-19* ini, pesantren ikut terkena dampaknya, terutama pesantren dalam kategori kecil dan sedang, seperti pemulangan para santri, pembelajaran jarak jauh, kebutuhan protokol kesehatan, dan kebutuhan operasional pesantren yang masih berjalan. Di lain pihak, sumber dana operasional pesantren berkurang. Para wali santri tidak bisa lagi membayar sumbangan ke pesantren dengan lancar, karena terkena dampak juga. Usaha-usaha katering tidak berjalan. Toko sepi pembeli. *Bisyaroh* yang diterima kiai juga sangat berkurang.

Pesantren sudah mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah sebesar Rp2,59 triliun untuk 21.000 pesantren, namun bantuan tersebut hanya digunakan untuk operasional pesantren dan pengadaan alat-alat kesehatan dalam menghadapi pandemi *covid-19* berupa masker, disinfektan dan peralatan pengecek suhu. Bantuan tidak menyentuh kepada kiai secara pribadi. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat dirumuskan permasalahan yaitu perlu atau tidak pemberian bantuan sosial kepada kiai secara pribadi. Hipotesis dari kajian ini adalah kiai, secara pribadi dan sebagai kepala rumah tangga, ikut terkena dampak pandemi *covid-19*, sehingga perlu untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah. Terutama kiai dari pesantren dengan kategori sedang dan kecil. Kerangka pemikiran kajian ini disusun seperti dalam Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan jawaban, apakah kiai secara pribadi perlu mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah dalam rangka pandemi *covid-19* ini. Langkah awal adalah dengan mengadakan diskusi grup terfokus dengan pihak-pihak terkait untuk mendapatkan masukan-masukan tentang kiai. Metode kuantitatif yang dipakai adalah

Regulatory Impact Assesment (RIA), dengan teori Analisa Biaya dan Manfaat (CBA) dan menggunakan *Analytical Hierarchy Process* (AHP) dalam pengolahan data kuesioner.

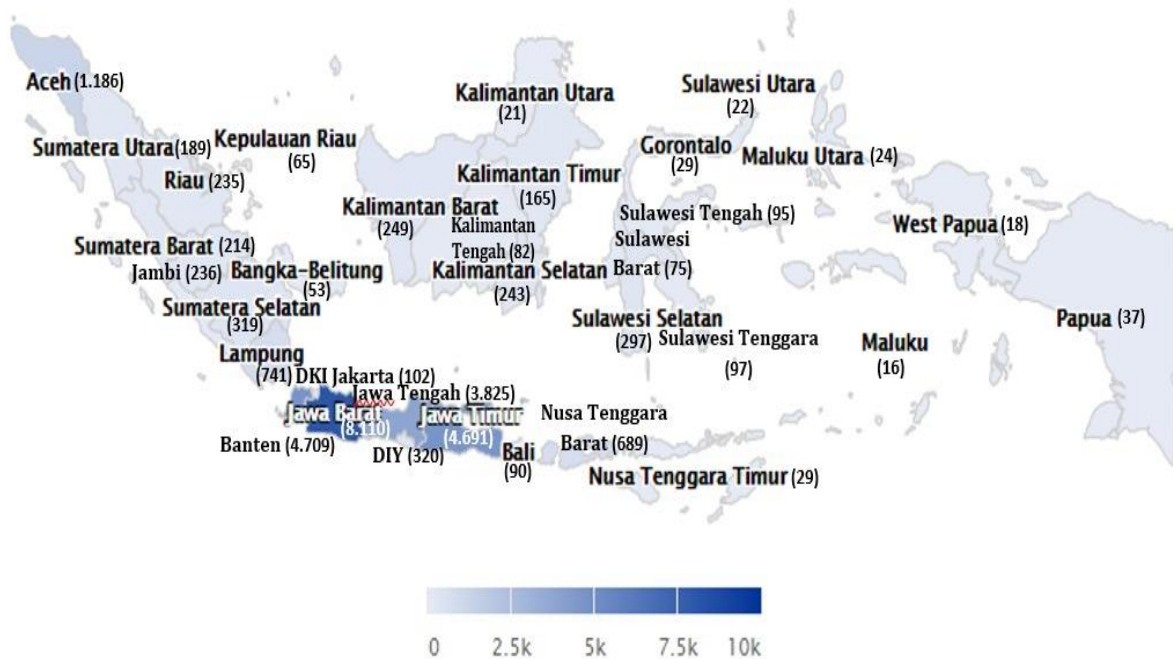
2. TINJAUAN PUSTAKA

Pondok pesantren adalah suatu lembaga pendidikan dan keagamaan yang berusaha melestarikan, mengajarkan, dan menyebarkan ajaran Islam serta melatih para santri untuk siap dan mampu mandiri. Ia merupakan suatu tempat para santri belajar pada seorang kiai untuk memperdalam atau memperoleh ilmu-ilmu agama yang diharapkan nantinya menjadi bekal bagi santri dalam menghadapi kehidupan di dunia dan akhirat. Definisi-definisi yang disampaikan oleh pengamat ahli memberikan variasi dan merupakan suatu hal yang tidak dapat dipungkiri. Hal ini justru semakin menambah khazanah dan wacana yang sangat diharapkan secara akademik.

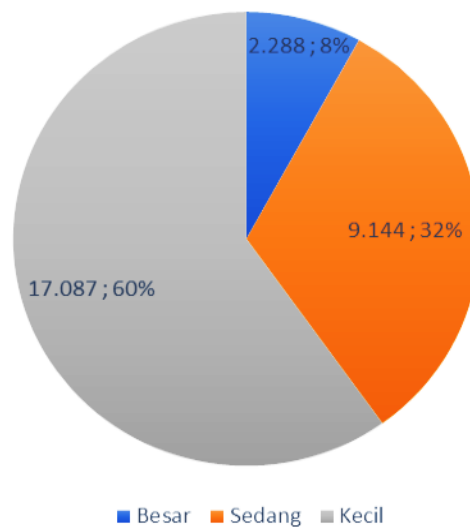
Kekhususan pesantren dibanding pendidikan keagamaan Islam lainnya adalah pengajian kitab kuning, yaitu kitab yang berwarna kuning yang merujuk pada karya ulama-ulama terdahulu, berisi tentang ilmu fiqih, tata bahasa Arab, akidah, ilmu tafsir, dan lain-lain. Oleh karena itu, kitab kuning identik dengan pesantren, menjadi rujukan utama dan menjadi salah satu elemen bagi pesantren. Dengan bahasa ekstremnya, suatu lembaga tidak dapat dikatakan sebagai pesantren apabila di dalamnya tidak mengkaji kitab kuning. Hal ini menunjukkan betapa erat hubungan antara pesantren dan kitab kuning (Sururin, 2012).

Pesantren sebagai institusi pendidikan yang dibentuk oleh kiai bersangkutan adalah kegiatan utama yang selalu diupayakan untuk ada. Hal tersebut pada banyak sisi dikarenakan sifat gerakan kiai sebagai aktivitas dakwah, mengubah kondisi menuju ke arah yang lebih baik. Upaya perubahan yang dilakukan oleh para kiai biasanya tidak terbatas hanya dengan mengadakan pendidikan dalam sebuah masyarakat. Pada kenyataannya, pondok pesantren lebih merupakan pusat peradaban sebuah masyarakat tertentu dengan perkembangan teknologi dan fasilitas-fasilitasnya. Hal ini akan lebih tampak jika terjadi ketidakstabilan negara dalam perannya terhadap masyarakat. Kiai dan institusi yang dibentuknya mengisi kekosongan oleh negara dengan menyediakan segala hal yang dibutuhkan masyarakat sekitar (Achidsti, 2014). Misalnya dalam masa-masa kesulitan ekonomi yang dihadapi Indonesia pada tahun 1950 hingga 1960-an, pembaruan yang diselenggarakan pesantren banyak berkenaan dengan pemberian keterampilan, khususnya dalam bidang pertanian (Azra, 1997 dalam Madjid, 1997). Hal ini dapat menunjang ekonomi pesantren itu sendiri sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi dan pangan masyarakat sekitarnya.

Jumlah pondok pesantren di Indonesia mencapai 28.519 pondok yang tersebar di seluruh provinsi dan kabupaten/kota. Di Jawa sebanyak 80 persen dan luar Jawa 20 persen. Sebarannya dapat dilihat pada gambar 2. Dari jumlah pesantren sebanyak 28.519 pondok tersebut, diklasifikasikan lagi berdasarkan jumlah santrinya menjadi pesantren kategori besar (di atas 1.500 santri), kategori sedang (500-1.500 santri), dan kategori kecil (di bawah 500 santri). Berdasarkan kategori tersebut, terbanyak adalah pesantren dengan kategori kecil sebesar 17.087 pesantren (60 persen), seperti nampak pada gambar 3. Pengkategorian ini juga berkaitan dengan kemampuan keuangan pondok pesantren dalam membiayai kebutuhan operasional pondok pesantren sehari-hari.



Gambar 2. Sebaran Pesantren di Indonesia



Gambar 3. Kategori Pesantren Berdasarkan Jumlah Santri

Di samping kegiatan belajar mengajar di pesantren, kegiatan usaha yang dilakukan kiai dengan pesantrennya yang masuk kategori sedang dan kecil, sebagian besar adalah kegiatan usaha yang termasuk ke dalam sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dengan kekayaan bersih kurang dari Rp50 juta sebulan. Usaha yang dilakukan biasanya berupa toko kelontong dan penyediaan pangan untuk kebutuhan sehari-hari untuk para santri. Hal ini berdasarkan hasil dari diskusi grup terfokus pada tanggal 4 September 2020 antara Direktorat Jenderal Anggaran bersama Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama. Sektor UMKM yang selama ini berkontribusi cukup besar terhadap perekonomian nasional, adalah salah satu sektor yang terdampak pandemi

covid-19 cukup serius. Menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, ada sekitar 37.000 UMKM yang memberikan laporan bahwa mereka terdampak sangat serius dengan adanya pandemi ini. Kebijakan jangka pendek yang dapat diterapkan untuk membantu UMKM adalah bantuan keuangan baik dalam bentuk pinjaman lunak atau bantuan tunai langsung dengan melibatkan pemerintah dan sektor swasta (Pakpahan, 2020).

Pelemahan kegiatan usaha kiai memungkinkan untuk tumbuhnya kemiskinan baru, sehingga memerlukan adanya bantuan sosial dari pemerintah untuk menanggulangnya, sehingga nantinya diharapkan bisa mengurangi jumlah penduduk miskin, atau mencegah adanya penduduk miskin baru. Hal ini sejalan dengan kesimpulan kajian Palupi dan rekan, bahwa berdasarkan hasil pengujian korelasi antara bantuan sosial dengan jumlah penduduk miskin menunjukkan pengaruh negatif. Artinya semakin tingginya anggaran pemerintah untuk bantuan sosial akan berdampak pada penurunan jumlah penduduk miskin (Palupi dan Ramadhani, 2019). Di sisi lain, dalam praktek penyaluran bantuan sosial ke depannya, berdasarakan hasil kajian bantuan sosial oleh KPK menyimpulkan: 1) Perlunya perbaikan kebijakan bantuan sosial karena sesuai UU Nomor 11 Tahun 2009 bantuan sosial hanya merupakan bagian dari perlindungan sosial. Praktik saat ini cakupannya tidak hanya untuk perlindungan sosial sehingga berpotensi penyalahgunaan kewenangan, 2) Belanja bantuan sosial perlu dipusatkan di Kementerian Sosial dan pemerintah menetapkan grand design penyelenggaraan bantuan sosial dan menyusun basis data terpadu belanja bantuan sosial.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah Analisis Dampak Regulasi (RIA). RIA merupakan salah satu metode yang sering dipakai di dalam pemilihan suatu regulasi atau kebijakan yang akan digunakan. RIA banyak digunakan di negara maju untuk mengkaji permasalahan akan kebutuhan suatu regulasi, menghitung untung ruginya (analisis manfaat dan biaya), dan mempertimbangkan berbagai alternatif solusi atas masalah yang diidentifikasi. Konsultasi kepada berbagai pemangku kepentingan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari metode ini. RIA adalah proses analisis dan pengkomunikasian secara sistematis terhadap dampak kebijakan, baik kebijakan baru maupun kebijakan yang sudah ada. RIA sejalan dengan prinsip-prinsip pembentukan peraturan yang baik, dan sejalan dengan proses pembentukan peraturan di era partisipasi publik.

RIA merupakan alat kebijakan yang dipakai secara luas di negara-negara *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD). OECD merekomendasikan untuk meningkatkan kualitas peraturan pemerintah yang dapat diterima secara internasional. Di antaranya melakukan berbagai perbaikan, termasuk rekomendasi referensi peraturan *checklist* untuk pengambilan keputusan dan komitmen yang kemudian diakomodasikan ke dalam bentuk RIA (Satria, 2015). Tahapan-tahapan dalam RIA dapat digambarkan sebagai berikut (Kusumo, 2015).



Gambar 4. Tahapan-tahapan dalam RIA

Langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan diskusi grup terfokus antara Direktorat Jenderal Anggaran bersama Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama. Direktorat tersebut adalah unit Eselon II di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, yang menangani program-program pembinaan dan kurikulum pada pendidikan diniyah dan pondok pesantren. Dari Direktorat Jenderal Anggaran dihadiri oleh Kasubdit Anggaran Bidang Agama dan Lembaga Tinggi Negara beserta tim, sedangkan dari Kementerian Agama diwakili langsung oleh Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren beserta pejabat Eselon III dan IV. Diskusi bertujuan untuk menggali informasi terkait pondok pesantren dan kehidupan sehari-hari kiai pemilik pesantren. Hasil diskusi digunakan sebagai penguat atas perumusan masalah, tujuan dan pilihan alternatif yang telah ditentukan.

Langkah selanjutnya adalah melakukan pemetaan kondisi yang mungkin terjadi atas pemberian bantuan sosial kepada kiai, ditinjau dari aspek ekonomi dan sosial, dari sisi biaya dan manfaat. Kemudian dilakukan analisis biaya dan manfaat terhadap kondisi-kondisi tersebut. Analisis biaya dan manfaat adalah suatu cara untuk memperhitungkan manfaat dan biaya atas alternatif kondisi yang mungkin terjadi atas kebijakan yang akan diambil. Hasil akhir keputusan pengambilan kebijakan adalah dengan memperhitungkan rasio antara biaya dan manfaat. Semakin besar rasio manfaat dibanding biaya, maka suatu kebijakan dapat diimplementasikan. Sebaliknya, semakin besar rasio biaya dibanding manfaat, maka kebijakan tersebut belum dapat dilaksanakan (Brojonegoro, 1992).

Peta kondisi yang berhasil disusun digambarkan dalam Tabel 1. Pengertian masing-masing kondisi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

Sisi manfaat pada aspek ekonomi:

1. Daya beli meningkat, artinya dengan adanya pemberian bantuan sosial kepada kiai sebagai individu, maka akan memberi manfaat secara ekonomi berupa kenaikan daya beli kiai tersebut.
2. Mendukung operasional ponpes, bahwa dengan adanya bantuan sosial kepada kiai, walaupun bantuan tersebut diberikan kepada kiai sebagai individu, namun kiai akan mengalokasikan sebagiannya untuk tambahan dukungan operasional pesantren.
3. Menstimulus usaha kiai, bahwa dengan adanya bantuan sosial tersebut, bagi kiai yang memiliki bidang usaha, maka bantuan tersebut sebagian akan digunakan untuk menambah

modal/menstimulus usahanya tersebut sehingga menjadi lebih kuat.

4. Menggerakkan usaha mikro sekitar ponpes, artinya dengan adanya bantuan sosial kepada kiai, maka tambahan penghasilan tersebut akan digunakan untuk membeli hasil produk usaha mikro di sekitar ponpes.

Tabel 1. Peta Kondisi Pemberian Bantuan Sosial kepada Kiai

No	Manfaat		Biaya	
	Ekonomi	Sosial	Ekonomi	Sosial
1	Daya beli meningkat.	Terjaganya hubungan baik dengan pemerintah.	Membebani Keuangan Negara	Wibawa/marwah turun
2	Mendukung operasional Ponpes.	Kepercayaan meningkat.	Kemandirian berkurang	Kecemburuan Sosial
3	Menstimulus usaha Kiai.	Terjaganya status sosial	Cenderung Konsumtif	Contoh Kurang Baik
4	Menggerakkan usaha mikro sekitar ponpes.	--	--	Salah Paham atas Pemberian Bantuan

Sisi manfaat pada aspek sosial:

1. Terjaganya hubungan baik dengan pemerintah, artinya dengan adanya bantuan sosial kepada kiai, menunjukkan adanya perhatian pemerintah atau kehadiran negara kepada kiai, sehingga hubungan pemerintah dengan kiai terjaga dengan baik (hubungan umara dan ulama menjadi harmonis).
2. Kepercayaan meningkat, dengan adanya bantuan sosial kepada kiai, menunjukkan adanya kepercayaan pemerintah terhadap kiai tersebut. Kepercayaan pemerintah menambah kepercayaan masyarakat terhadap ajaran yang disampaikan kiai tersebut.
3. Terjaganya status sosial, artinya dengan adanya bantuan sosial kepada kiai akan menambah penghasilan bagi kiai tersebut, sehingga tidak dipandang sebagai individu yang kekurangan, sehingga secara sosial kedudukannya/statusnya tetap terjaga.

Sisi biaya pada aspek ekonomi:

1. Membebani keuangan negara, dengan adanya pengeluaran untuk bantuan sosial kepada kiai, maka pengeluaran negara bertambah, sehingga beban keuangan negara semakin berat.
2. Kemandirian berkurang, artinya kalau kiai dibantu efek negatifnya akan selalu mengharap bantuan pemerintah, sehingga kiai kurang mandiri.
3. Cenderung konsumtif, dengan adanya bantuan sosial dari pemerintah, maka pendapatan kiai bertambah, sehingga pengeluaran kiai juga akan bertambah untuk hal-hal yang bersifat konsumtif.

Sisi biaya pada aspek sosial:

1. Wibawa/marwah turun, artinya dengan adanya bantuan sosial kepada kiai, maka masyarakat menilai bahwa kiai tersebut dapat dibeli oleh pemerintah, dengan penilaian tersebut maka wibawa kiai menjadi turun di mata masyarakat.
2. Kecemburuan sosial, dengan adanya bantuan sosial kepada kiai, akan dapat menimbulkan kecemburuan pada pekerja profesi dan masyarakat awam lainnya.

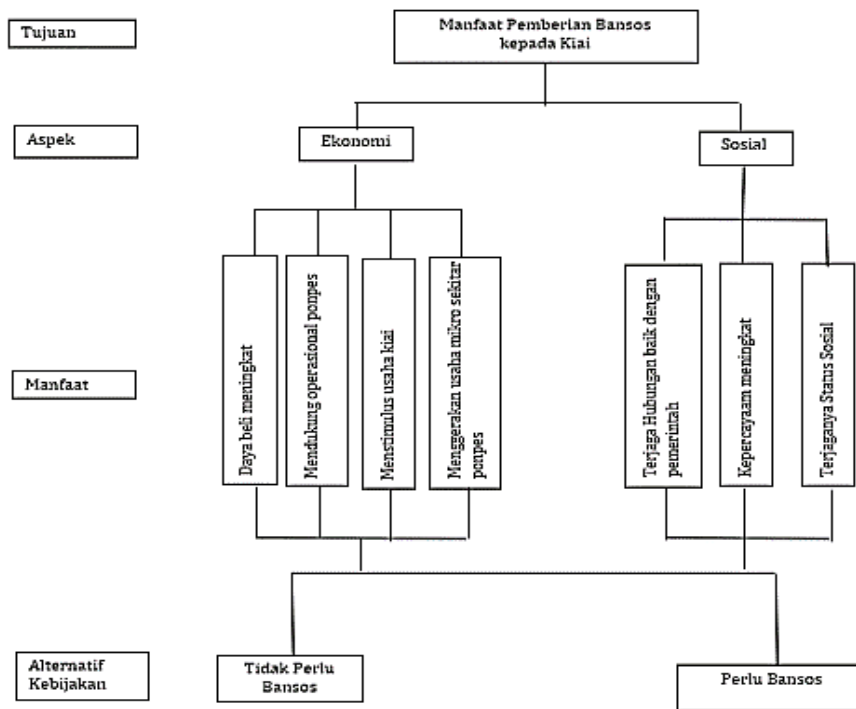
3. Contoh kurang baik, dengan adanya pemberian bantuan sosial kepada kiai, akan memberi dampak berupa sikap masyarakat untuk mendapat bantuan serupa, mengingat kiai adalah panutan/ccontoh bagi masyarakat.
4. Salah paham atas pemberian bantuan, dengan adanya bantuan sosial kepada kiai, pemerintah dapat dinilai akan bisa mengendalikan idealisme ajaran-ajaran kiai.

Faktor-faktor kondisi di atas bersifat kualitatif, maka proses analisis CBA yang dilakukan adalah dengan memakai model AHP. Model AHP adalah suatu model yang mampu menggabungkan faktor-faktor kualitatif dengan kuantitatif serta memakai persepsi yang sebenarnya dari para ahli sebagai inputnya. AHP adalah salah satu bentuk model pengambilan keputusan atas suatu pilihan-pilihan manusia yang cukup kompleks, yang dapat digunakan untuk membantu kerangka berpikir manusia. AHP ini dikembangkan oleh Thomas L. Saaty. Alat utamanya adalah sebuah hierarki fungsional dengan input utama berupa persepsi-persepsi manusia. Metode AHP didesain untuk menangkap persepsi orang yang ahli dengan permasalahan tertentu melalui prosedur yang didesain untuk sampai pada tingkat preferensi di antara berbagai kumpulan atau set alternatif, sehingga metode ini dianggap sebagai model *objective – multicriteria*. Kriteria ahli di sini bukan berarti bahwa orang tersebut haruslah jenius, pintar, atau bergelar doktor tetapi lebih mengacu pada orang yang mengerti benar permasalahan yang diajukan, merasakan akibat suatu masalah, atau punya kepentingan terhadap masalah tersebut.

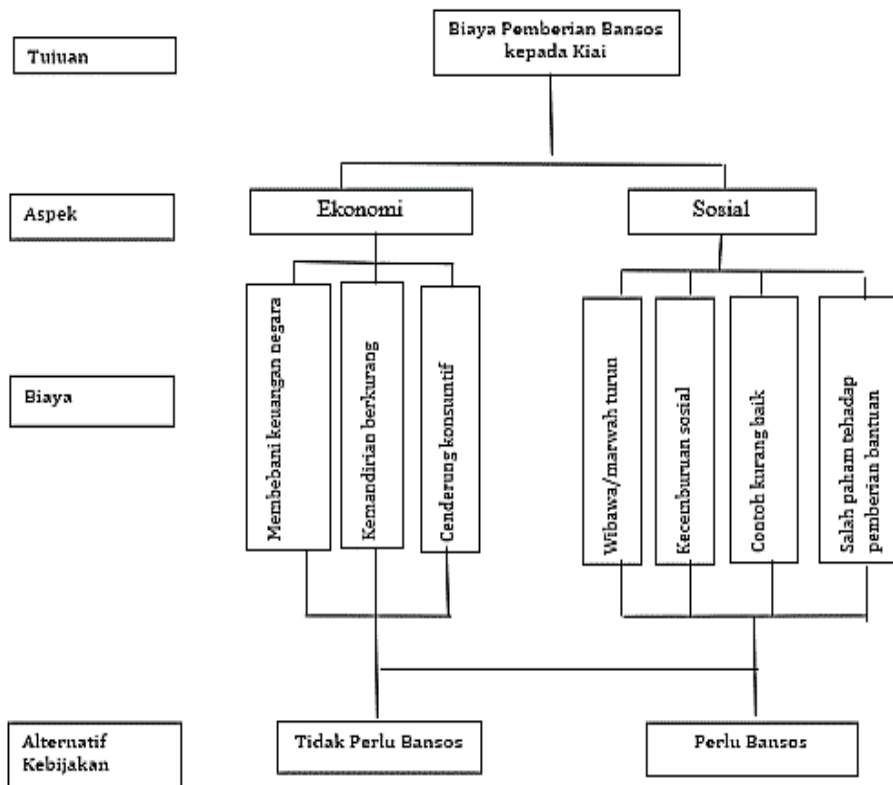
Pada prinsipnya AHP adalah 1) metode yang memecah suatu masalah yang kompleks dan tidak terstruktur ke dalam kelompok-kelompoknya, mengatur kelompok-kelompok tersebut menjadi lebih sederhana ke dalam suatu hirarki fungsional, yang disebut dengan *decomposition*, kemudian 2) memasukkan nilai numerik sebagai pengganti persepsi manusia dalam melakukan perbandingan relatif, dan akhirnya dengan suatu sintesis ditentukan elemen mana yang mempunyai prioritas tertinggi. Bobot yang lebih besar dari suatu indikator, menunjukkan indikator yang lebih penting dibandingkan indikator lainnya dalam menentukan prioritas pilihan kebijakan, yang disebut dengan *comparative judgment*.

Mengingat manfaat dan biaya adalah dua hal yang sangat berbeda dan bertolak belakang maka pemecahan masalah analisa manfaat dan biaya dibuat dalam dua hirarki untuk tercapainya pemecahan masalah yang optimal. Satu hierarki khusus membahas manfaat dari suatu tindakan, dan hierarki lainnya membahas biaya yang timbul dari tindakan tersebut. Hierarki manfaat dan biaya atas pemberian bantuan sosial kepada kiai dapat dilihat pada Gambar 5 dan 6.

Pengambilan data primer dilakukan dengan menyebarkan kuesioner AHP yang diisi oleh berbagai pihak yang ahli (mengetahui secara mendalam) tentang seluk-beluk pemberian bantuan sosial dikaitkan dengan manfaat dan biaya, serta kehidupan kiai. Kuesioner dikirimkan kepada 14 (empat belas) responden dari empat unsur yang berbeda yang dianggap cukup mewakili responden ahli. Mereka terdiri dari 4 (empat) responden dosen/peneliti yang berkecimpung dalam penelitian-penelitian sosial, 4 (empat) responden dari Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama, 4 (empat) responden dari pejabat fungsional Analis Anggaran Madya yang berkecimpung di dalam penelitian-penelitian anggaran, dan 2 (dua) responden dari pejabat eselon III pada Ditjen Anggaran. Data yang masuk sebanyak 13 (tiga belas) responden.



Gambar 5. Hierarki Sisi Manfaat



Gambar 6. Hierarki Sisi Biaya

Kuesioner disusun dengan menggunakan matriks *pairwise comparison* (matriks perbandingan berpasangan) untuk menghasilkan bobot relatif antarkriteria maupun alternatif. Suatu kriteria akan dibandingkan dengan kriteria lainnya dalam hal seberapa penting terhadap pencapaian tujuan. Skala penilaian menggunakan angka 1 – 9 untuk memperbandingkan elemen satu dengan lainnya, dengan menggunakan skala sebagai berikut:

1. Nilai 1, bila kedua elemen **sama penting** (*equal importance*);
2. Nilai 3, bila elemen yang satu **sedikit lebih penting** dibanding yang lain (*moderate importance*);
3. Nilai 5, bila elemen **yang satu lebih penting dibanding yang lain** (*essential/strong importance*);
4. Nilai 7, bila elemen yang satu **jelas sangat penting dibanding yang lain** (*very strong importance*);
5. Nilai 9, bila elemen yang satu **mutlak lebih penting** dibanding yang lain (*extreme importance*);
6. Sedangkan nilai 2,4,6,8 angka antara di atas, yaitu bila ragu-ragu dalam menentukan skala misal 4 antara 3 dan 5.

Dari perbandingan tersebut kemudian dibuat matriks *pairwise comparison* di dalam kuesioner. Hasil jawaban dari kuesioner yang masuk kemudian diolah dengan menggunakan aplikasi *Expert Choice* versi 2000_2nd.

4. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pengolahan data dilakukan dengan menabulasikan hasil kuesioner yang dilakukan secara aklamasi dalam bentuk matriks *pairwise comparasion* yang membandingkan antara berbagai aspek penentu pemberian bantuan sosial. Langkah selanjutnya, menghitung rasio tiap elemen terhadap nilai total elemen pada matriks *pairwise* pada masing-masing sisi, yaitu sisi manfaat dan biaya. Untuk mendapatkan hasil akhir, dilakukan perbandingan pembobotan rasio antara kedua sisi tersebut.

Hasil Pengolahan dengan aplikasi *Expert Choice* adalah sebagai berikut:

1. Sisi Manfaat:

Goal: Manfaat Pemberian Bansos kepada Kiai



Gambar 7. Matrik Perbandingan dari segi Aspek pada Level 2

Hasil pengolahan menunjukkan bahwa ditinjau dari sisi manfaat pemberian bantuan sosial kepada kiai, aspek ekonomi (dengan nilai 0,529) dianggap lebih menentukan daripada aspek sosial (dengan nilai 0,471).

Goal: Manfaat Pemberian Bansos kepada Kiai
>Ekonomi



Gambar 8. Matriks Perbandingan Butir-butir Manfaat pada Aspek Ekonomi pada Level 3

Hasil pengolahan menunjukkan bahwa pemberian bantuan sosial kepada kiai ditinjau dari sisi manfaat pada aspek ekonomi, dipandang dapat ikut mendukung kelancaran operasional pondok pesantren yang dipimpinnya, dibanding manfaat ekonomi lainnya.

Goal: Manfaat Pemberian Bansos kepada Kiai
>Sosial



Gambar 9. Matriks Perbandingan Butir-butir Manfaat pada Aspek Sosial pada Level 3

Hasil pengolahan menunjukkan bahwa pemberian bantuan sosial kepada kiai ditinjau dari sisi manfaat pada aspek sosial, dipandang dapat menjaga hubungan baik antara kiai dan pesantrennya dengan pemerintah, dibanding manfaat sosial lainnya.

Goal: Manfaat Pemberian Bansos kepada Kiai

Overall Inconsistency = .02



Gambar 10. Kesimpulan untuk Sisi Manfaat pada Level 4

Kesimpulan dari sisi Manfaat berdasarkan hasil pengolahan AHP adalah **perlu diberikan bantuan sosial kepada kiai** dengan ratio 0,684, lebih besar dibanding tidak perlu diberikan bantuan sosial dengan nilai ratio 0,316.

2. Sisi Biaya:

Goal: Biaya Pemberian Bansos kepada Kiai



Gambar 11. Matriks Perbandingan dari segi Aspek pada Level 2

Hasil pengolahan menunjukkan bahwa ditinjau dari sisi biaya pemberian bantuan sosial kepada kiai, biaya pada aspek ekonomi (dengan nilai 0,672) dianggap lebih besar daripada aspek sosial (dengan nilai 0,328).

Goal: Biaya Pemberian Bansos kepada Kiai
>Ekonomi



Gambar 12. Matriks Perbandingan Butir-butir Biaya pada Aspek Ekonomi pada Level 3

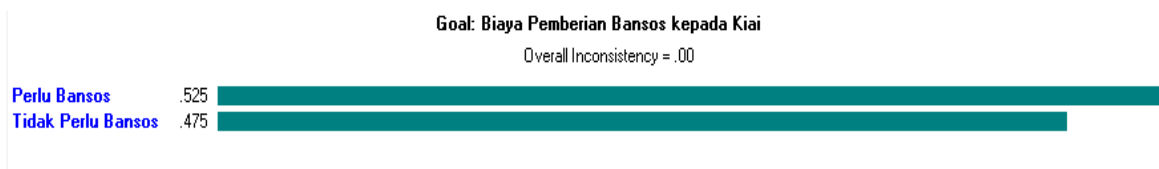
Hasil pengolahan menunjukkan bahwa pemberian bantuan sosial kepada kiai ditinjau dari sisi biaya pada aspek ekonomi, dipandang bahwa beban keuangan negara lebih tinggi nilainya jika diberikan bantuan sosial kepada kiai, dibanding biaya ekonomi lainnya.

Goal: Biaya Pemberian Bansos kepada Kiai
>Sosial



Gambar 13. Matriks Perbandingan Butir-butir Biaya pada Aspek Sosial pada Level 3

Hasil pengolahan menunjukkan bahwa pemberian bantuan sosial kepada kiai ditinjau dari sisi biaya pada aspek sosial, biaya terbesar yang timbul adalah salah paham terhadap pemberian bantuan sosial kepada kiai dan pesantrennya, dibanding biaya sosial lainnya.



Gambar 14. Kesimpulan untuk Sisi Biaya pada Level 4

Kesimpulan dari sisi biaya berdasarkan hasil pengolahan AHP adalah tetap **perlu diberikan bantuan sosial kepada kiai** dengan ratio 0,525, lebih besar dibanding tidak perlu diberikan bantuan sosial dengan nilai ratio 0,475.

Tabel 2. Hasil CBA

No.	Alternatif	Manfaat	Biaya	B/C Ratio
1	Tidak perlu bantuan sosial	0.316	0.475	0.665
2	Perlu bantuan sosial	0.684	0.525	1.303

Hasil akhir kesimpulan untuk CBA dapat dituangkan dalam Tabel 2. Dengan demikian, jika diperbandingkan hasil alternatif dari sisi manfaat dan biaya, kesimpulan yang didapat dan layak adalah kebijakan pemberian bantuan sosial kepada kiai.

5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Beberapa hal yang dapat ditarik kesimpulan dari kajian ini yaitu pertama bahwa kehidupan kiai dalam masa pandemi *covid-19* ikut terpengaruh pada kehidupan kiai sehari-hari. Kedua, dari hasil pengolahan AHP, perlu diambil suatu kebijakan untuk memberikan bantuan sosial kepada kiai pada pondok pesantren.

Berdasarkan temuan penelitian dapat disarankan bahwa pertama, perlu diambil kebijakan pemberian bantuan sosial kepada kiai yang dialokasikan pada program PEN pada tahun anggaran 2021. Bantuan sosial cukup diberikan kepada kiai dengan pesantrennya yang termasuk ke dalam kategori pesantren kecil dan menengah saja. Pesantren dengan kategori besar, kehidupan kainya diduga tidak mengalami dampak yang serius akibat wabah pandemi *covid-19*, namun hal ini perlu dilakukan kajian lebih lanjut. Kedua, perlu dilakukan kajian lanjutan atas kajian ini, terkait dengan jenis bantuan sosial apa yang akan diberikan kepada kiai dan tata cara penyalurannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Achidsti, Sayfa Auliya. (2014). Eksistensi Kiai dalam Masyarakat. *Ibda, Jurnal Kebudayaan Islam*, Vol.12, No.2.
- Brojonegoro, Bambang PS. (1992). AHP. Jakarta : Universitas Indonesia
- Dhofier, Zamakhsyari. (1982). Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai. Jakarta: LP3ES.
- Kusumo, Hendro Bowo. (2015). Analisis Dampak Regulasi tentang Persyaratan Luas Minimal Lahan Setiap Kavling/Unit Perumahan di Kota Depok. Jakarta : Universitas Indonesia.
- Lindiasari S, Palupi, Ramadhani, Aji Wahyu. (2019). Efektifitas Bantuan Sosial dalam Penanggulangan Kemiskinan di Tengah Pelambatan Ekonomi Indonesia dengan Pendekatan Non-Parametrik. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* Vol.5 No.1 Maret 2019
- Madjid, Nurcholish (1977). Bilik-bilik Pesantren, Sebuah Potret Perjalanan. Jakarta: Paramadina.
- Muhakamurrohman, Ahmad. (2014). Pesantren: Santri, Kiai, dan Tradisi. *Ibda, Jurnal Kebudayaan Islam*, Vol.12, No.2.
- Pakpahan, Aknolt Kristian. (2020). COVID-19 dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*.
- Satria, Rahmad. (2015). Penerapan Metode *Regulatory Impact Assesment* (RIA) dalam Penyusunan Regulasi Daerah. *Majalah Masalah-masalah Hukum* Jilid 44 Nomor 2, April 2015.
- Sururin. (2012). Kitab Kuning: Sebagai Kurikulum di Pesantren. Jakarta : UIN.
- Syah Aji, Rizqon Halal. (2020). Dampak Covid-19 pada Pendidikan di Indonesia: Sekolah, Keterampilan, dan Proses Pembelajaran, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, Volume 7 Nomor 5.
- Ziemek, Manfred. (1986). Pesantren Dalam Perubahan Sosial. Jakarta: P3M.